

**GUIDANCE AND SUPERVISION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT BY
THE LOCAL GOVERNMENT OF GUNUNG KIDUL TO THE VILLAGE
THAT IS NOT GOOD IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND**

By:

Riez Kifli Kolewora,¹ Richo Andi Wibowo²

ABSTRACT

This research aims to analyze the form of supervision and guidance by the Local Government of Gunung Kidul to the management of village fund in the village of Bunder and Songbanyu village and find the problem of village fund management that occurred in the two villages. In addition, this research also analyzes the efforts that can be made by the Local Government of Gunung Kidul to improve the supervision and guidance of village fund management that problems occurred in Bunder and Songbanyu villages will not happen again and to avoid similar problems occurred in other villages in Gunung Kidul.

This kind of research is an empirical research. The main data were obtained from field research. Data analysis used is qualitative analysis presented in descriptive form in order to give description and data relevant for this research.

The results showed that: The First, in the implementation of guidance and supervision on village fund management conducted by the Local Government of Gunung Kidul in Bunder village and Songbanyu village is considered ineffective, because of monitoring system conducted by the Local Government of Gunung Kidul to oversee the management of village fund only implemented once every three years considered ineffective. Monitoring system conducted by the Local Government of Gunung Kidul raises a gap or a big opportunity for the occurrence of problems in the management of village fund as happened in the village of Bunder and Songbanyu village. The second, related to the efforts that can be done by the Local Government of Gunung Kidul to improve the guidance and supervision of village fund management are opening consultancy services, guiding villages to financial transparency, developing PKPT based on risk assessment, optimizing Siskeudes implementation, make efforts to add the auditors and conducting synergic oversight between the Local Government of Gunung Kidul with the village society.

Key words: *Guidance and Supervision, Village Fund, Village Fund Management.*

¹Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

²Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL TERHADAP DESA YANG DIPANDANG TIDAK BAIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Oleh:

Riez Kifli Kolewora,³ Richo Andi Wibowo⁴

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terhadap pengelolaan dana desa di desa Bunder dan desa Songbanyu dan melihat persoalan pengelolaan dana desa yang terjadi di dua desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar persoalan yang terjadi di desa Bunder dan desa Songbanyu tidak terulang lagi serta untuk menghindari persoalan serupa terjadi pada desa-desa lainnya di Gunung Kidul.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. Data utama diperoleh melalui penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dihadirkan dalam bentuk deskriptif agar dapat memberikan gambaran dan penilaian terhadap data atau bahan hukum yang dikumpulkan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di desa Bunder dan desa Songbanyu dinilai tidak efektif, hal tersebut karena sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mengawasi pengelolaan dana desa hanya dilaksanakan tiga tahun sekali sehingga dinilai tidak efektif. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memunculkan celah atau kesempatan yang sangat besar bagi terjadinya persoalan dalam pengelolaan dana desa sebagaimana yang terjadi di desa Bunder dan desa Songbanyu. Kedua, terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yaitu dengan cara membuka layanan konsulting, membimbing desa melakukan transparansi keuangan, menyusun PKPT berdasarkan penilaian resiko, melakukan optimalisasi penerapan Siskeudes, melakukan upaya penambahan auditor, serta melakukan sinergitas pengawasan antara Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan masyarakat desa.

Kata kunci: *Pembinaan dan Pengawasan, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa.*

³Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.